

Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi

Dony Arung Triantoro

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adi Sucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: arungdony73@gmail.com

Abstract: *The DKI Jakarta Election Contest 2017 is inseparable from the discourse of politicization of ethnic, religious, racial, and intergroup issues (SARA) in campaign activities. This study aims to examine the practice of identity politics carried out by Anies-Sandi in their social media account. The results of this study indicate that the practice of identity politics in their social media account tends to display Islamic religious symbols. The strengthening practice of this identity politics represents the emergence of radical Islamic movements, conservatives, Islamism, and upper-middle-class muslims in Indonesia. Finally, identity politics will slowly weaken Pancasila democracy in Indonesia.*

Keywords: *blasphemy, identity politics, social media*

Abstrak: *Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terlepas dari wacana politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik identitas yang dilakukan oleh pasangan Anies-Sandi di akun media sosialnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik politik identitas di akun Media Sosial Anies-Sandi cenderung menampilkan simbol-simbol keagamaan Islam. Menguatnya praktik politik identitas tersebut merepresentasikan kemunculan gerakan Islam radikal, konservatif, Islamisme, dan muslim kelas menengah ke atas di Indonesia. Akhirnya, politik identitas secara perlahan akan melemahkan demokrasi Pancasila di Indonesia.*

Kata Kunci: *media sosial, penistaan agama, politik identitas*

Euforia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta 2017 telah menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia (Hadiz, 2017, h. 261-262). Pasalnya, pesta demokrasi tersebut telah diwarnai praktik politik identitas yang mengancam pluralisme. Mobilisasi politik identitas yang terjadi dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tercermin dari tingginya praktik politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan

(SARA) dalam kampanye politik mereka (Bawaslu, 2017, h. 1).

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik isu SARA menjadi persoalan penting dalam kontestasi Pilkada. Di samping itu, praktik politik identitas berimplikasi pada sulitnya kalangan minoritas memiliki jabatan politik di pemerintahan (Banducci, Donovan, & Karp, 2004, h. 538; Mansbridge, 1999; Phillips, 1998, h. 12–13). Oleh karena itu,

politik identitas menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Secara khusus, penelitian tersebut fokus pada dinamika politik identitas di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara yang memiliki keanekaragaman etnis dan budaya, sehingga berpeluang memunculkan masalah politik identitas.

Penelitian terkait politik identitas oleh Li (2008, h. 1-13) mengkaji tentang konsekuensi-konsekuensi yang dialami oleh para pemimpin etnis minoritas di Cina. Sementara itu, Hai (2002, h. 101-148) meneliti kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) di Malaysia dan membahas tentang pentingnya formula Pemilu di Malaysia sebagai negara yang multietnis dan rentan terhadap praktik mobilisasi isu SARA. Sedangkan Phillips (1998, h. 1-26) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan golongan, etnis, agama, dan suku tidak hanya memperkecil ruang kesempatan pemimpin etnis minoritas untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga berimplikasi pada ketimpangan sosial.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam kehidupan demokrasi, yakni melalui rekonstruksi wacana politik, dari politik berbasis ide ke politik berbasis kehadiran. Politik kehadiran merupakan strategi politik yang menghadirkan perwakilan dari identitas etnis, agama, dan suku minoritas dan mayoritas agar bisa tampil bersama-sama di panggung demokrasi dan pemerintahan. Perwakilan kelompok minoritas bertujuan untuk membawa aspirasi kelompok minoritas, sehingga

tercipta kestabilan sosial dan politik. Namun, di sisi lain politik berbasis kehadiran justru cenderung mengarah pada politik identitas karena mereka tidak lagi membawa misi bersama, melainkan mewakili bendera etnisitas masing-masing (Phillips, 1998, h. 1-26).

Kajian-kajian sebelumnya (Li, 2008, h. 1-13; Hai, 2002) melihat fenomena praktik politik identitas dalam ruang *offline*. Politik identitas di Indonesia cenderung bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Dalam konteks *offline*, praktik politik identitas hanya menyebar pada sekelompok massa yang hadir, sedangkan dalam konteks *online*, praktik politik identitas mempunyai jangkauan yang lebih luas. Berbeda dengan Li (2008, h. 1-13) dan Hai (2002, h. 101-148), artikel ini akan mengkaji fenomena praktik politik identitas dan implikasi yang ditimbulkannya dalam ranah keagamaan dan kehidupan sosial di Indonesia. Secara khusus, artikel ini akan mengulas praktik politik identitas yang berlangsung dalam ruang *online*, terutama media sosial.

Artikel ini bertolak dari fakta bahwa masyarakat Indonesia telah menjadi masyarakat informasi yang didukung oleh penggunaan media internet dalam kehidupan sehari-hari. Data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bulan November tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 129,2 juta (97,4%) dari total pengguna internet di Indonesia menjadikan media sosial sebagai jenis platform media yang paling sering diakses. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia

menggunakan media sosial untuk memenuhi segala kebutuhan informasi mereka.

Tingginya penggunaan media sosial di masyarakat, jika dilihat dari data di atas, berpeluang menjadi sarana bagi aktor-aktor politik untuk mendulang suara masyarakat. Di samping itu, hal ini juga didukung oleh kondisi negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, media sosial juga dapat menjadi sarana pembentuk opini publik (Syahputra, 2017, h. 461).

Menurut Alejandro (2010, h. 1), media sosial adalah jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk teks, video, blog, foto, maupun pembaruan status di *Facebook* dan lainnya, serta mudah diakses. Sedangkan menurut Kaplan dan Haenlein (2010, h. 62), media sosial merupakan teknologi komunikasi dalam bentuk forum internet, *weblog*, blog sosial, *microblogging*, foto atau gambar, serta video dan perangkat lainnya dalam penggunaan informasi. Media sosial juga memberikan layanan dalam interaksi melalui teknologi internet yang disebut media interaktif (Burke, 2000, h. 380). Media sosial terdiri dari bangunan informasi yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi yang memiliki nilai individual, tetapi mencerminkan nilai kebersamaan, konten yang diambil dari bentuk pesan digital pribadi, gagasan, serta berita yang menjadi produk budaya seseorang, organisasi, atau industri yang memproduksi dan mengonsumsi alat tersebut dan isinya (Howard & Parks, 2012, h. 1–4).

Di media sosial, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk dukungan, ujaran kebencian, bahkan melangsungkan praktik politik identitas. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2017, h. 379) menyebutkan bahwa media sosial merupakan pendukung jaringan komunikasi politik dalam demokrasi bernegara. Di samping itu, keterbukaan media sosial sering mengakibatkan konflik antarkelompok politik yang disebabkan oleh berlimpahnya informasi dan pemberitaan yang bermuatan saling mengkritik, prasangka berlebihan, sektarian, dan komunalisme. Pada konteks ini, masyarakat perlu mempertimbangkan kebenaran informasi yang disampaikan melalui media (Cann, Dimitriou, & Hooley, 2011, h. 11).

Praktik politik identitas di media sosial akan dieksplorasi melalui fenomena Pilkada DKI Jakarta 2017, terutama pada akun media sosial Anies-Sandi. Akun media sosial Anies-Sandi dipilih sebagai kasus untuk melihat fenomena praktik politik identitas karena mereka secara massal melakukan penggiringan opini publik tentang politik identitas, seperti isu “seagama”. Alasan ini sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median, 2017) yang menunjukkan bahwa pada putaran kedua, suara pasangan Anies-Sandi meningkat signifikan dibandingkan pasangan Ahok-Djarot. Hal ini disebabkan ada wacana “seagama” yang tersebar di masyarakat, termasuk di media sosial. Wacana “seagama” membuat publik yang memilih Anies-Sandi di putaran kedua mencapai 27,1% (Median, 2017, h. 11).

Latar belakang dan konteks tersebut mendorong tulisan ini untuk membahas tentang praktik politik identitas yang berlangsung di ruang *online*. Selain itu, tulisan ini juga membahas implikasi yang ditimbulkan dari praktik politik identitas tersebut, terutama dalam kehidupan sosial dan agama. Artikel ini memberikan kontribusi dalam perbincangan politik identitas di ruang *online*, khususnya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini mendekati fenomena sosial yang secara khusus melihat alasan orang berperilaku dan berbuat seperti yang mereka lakukan (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2009, h. 4). Di samping itu, penelitian kualitatif ini mengacu pada Hammersley dan Atkinson (2007, h. 3-4) yang mempelajari data-data yang diperoleh untuk pengembangan konsep-konsep terkait praktik politik identitas di media sosial.

Data dikumpulkan melalui studi netnografi, yakni proses pengumpulan data dengan menggunakan internet (Kozinets, 2010, h. 95-117). Peneliti melakukan observasi pada halaman resmi *Facebook* Anies-Sandi. Objek yang diteliti berupa gambar, teks, maupun video yang relevan. *Facebook* dipilih karena intensitas gerakan kampanye yang dilakukan pasangan Anies-Sandi di media sosial ini cenderung lebih tinggi dibandingkan media sosial lainnya (Yulianti, 2017). Di samping itu, peneliti

juga mengumpulkan data-data pendukung melalui berbagai sumber pemberitaan *online* dan akun *Instagram* Anies Baswedan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough (1992, h. 39) melalui tiga tahapan. Pertama, *language practice*. Dalam tahapan ini, peneliti memilih bahasa yang mengandung politik identitas dalam teks, foto, atau video yang terdapat dalam *Facebook* dan *Instagram* Anies-Sandi. Kedua, *social practice*. Dalam tahapan ini, peneliti menafsirkan bahasa yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Ketiga, *discourse practice*. Dalam tahapan ini, peneliti menghubungkan hasil penafsiran tersebut dengan konteks sosial yang lebih luas, yaitu tempat teks diciptakan dan dikonsumsi. Pada langkah berikutnya, peneliti melakukan diskusi melalui literatur-literatur yang relevan dan menggunakan paradigma kritis untuk menuju pada kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga subbahasan yang diperoleh dalam penelusuran informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Temuan pertama menyangkut tentang Anies, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan media. Temuan kedua tentang isu penistaan agama dan politik identitas. Sedangkan temuan ketiga menyoal tentang politik identitas dan kehidupan demokrasi Indonesia.

Anies, PKS, dan Media

Praktik politik identitas dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam akun media sosialnya melalui elaborasi tiga

konsep penting, yaitu aktor politik (Anies Baswedan), PKS, dan media. Aktor politik dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang bergabung dalam sarana politik, baik organisasi maupun institusi, yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan politik (McNair, 2003, h. 5).

Anies Baswedan adalah salah satu aktor politik praktis di Indonesia yang keterlibatannya ditunjukkan pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Pada tahun tersebut, Anies dipercaya menjadi juru bicara pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Setelah kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014, Anies dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2014. Namun pengembanan jabatan ini tidak berlangsung lama karena Anies menjadi salah satu menteri yang namanya masuk dalam daftar perubahan susunan kabinet pada 27 Juli 2016 (Atriana, 2016).

Setelah itu, sejumlah partai politik memandang Anies berpeluang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama Anies juga masuk dalam daftar survei bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 (Indonesiaindicator, 2016). Akhirnya, Anies dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh dua partai politik, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan PKS. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha muda dan kader Partai Gerindra (Atriana, 2016).

Sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 sampai saat ini, sosok Anies Baswedan

tidak bisa dipisahkan dengan PKS. Ini terlihat dari sejumlah isu, misalnya Anies Baswedan selalu masuk dalam perbincangan dan pertimbangan di internal PKS (Purnamasari, 2018). PKS merupakan partai Islam dan partai dakwah yang dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin bentukan Hasan al-Bana pada tahun 1928 di Mesir. PKS sama seperti gerakan-gerakan Islamis lainnya, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Fron Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempunyai cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia.

PKS mengambil sikap berbeda dengan partai Islam lain. PKS menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuannya. PKS telah menjadikan Islam sebagai politik identitas pergerakannya karena mereka dengan jelas menyebut diri sebagai partai politik dan partai dakwah. PKS memang tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia. Partai ini telah mampu mengubah corak keislaman yang ditularkan oleh Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan cara-cara yang demokratis. Corak keislaman yang dimaksud di sini adalah cita-cita melaksanakan syariat Islam di Indonesia. Hal ini yang menjadikan PKS berkembang pesat sampai saat ini. Namun, apakah penerimaan demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia yang didengungkan oleh PKS hanya dijadikan siasat untuk menjadi partai besar dengan basis agama untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia? Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar sampai hari ini. Pertanyaan ini akan terjawab ketika suatu saat PKS

menduduki posisi kuat di pemerintahan (Maarif, 2012, h. 21-22 dan 26-27).

Salah satu langkah yang diambil oleh Anies untuk meraih simpati adalah dengan melakukan kampanye melalui media sosial. Kampanye ini merupakan langkah yang tepat karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Hal ini terlihat melalui data dari Novindari (2016) yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia meningkat secara signifikan. Media sosial dipahami tidak hanya sebagai sarana interaksi sosial secara umum, namun juga menjadi sumber pemberitaan politik. Para aktor politik memproduksi wacana politik secara bebas di media sosial. Bahkan ada sekitar 300 akun media sosial yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena teridentifikasi memiliki motif politik menyebarkan hoaks dan isu SARA yang bertujuan untuk mendapatkan suara masyarakat (Yovita, 2017).

Peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana politik telah menggeser media massa arus utama seperti televisi dalam memproduksi wacana perpolitikan. Masyarakat lebih suka mengonsumsi informasi politik melalui media sosial, meskipun akurasi tidak terjamin. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang membuat para aktor politik di Indonesia secara massal mulai menggunakan media sosial dalam membangun jaringan komunikasi politik mereka. Mereka menggunakan media sosial untuk memperkuat pengaruhnya di masyarakat (Castells, 2007, h. 240).

Temuan data menunjukkan bahwa akun media sosial Anies-Sandi teridentifikasi melakukan praktik politik identitas. Hal ini ditunjukkan melalui video sosialisasi yang dilakukan Anies-Sandi selama masa kampanye di akun *Facebook* dan *Instagram*-nya.

“(Pembukaan) ... Insy Allah tanggal 15 besok kita akan bisa menangkan Jakarta. Jadi ibu-ibu semuanya, ini saya *muter* ke kanan sekarang ini biar kelihatan. Ibu, saya nengok ke kanan kameranya naik semua. Kapan dengerinnya nanti bu, Ibu-Ibu yang saya hormati. Baru ke sini *uda* ditarik lagi ke sini, Bu. Nanti ini kayak kipas angin Bu, bergeser *gitu*, bergeser lagi ke kanan lagi. Jadi Ibu-Bapak semuanya, saya ingin tanya *dulu* ini. Ibu-Ibu mau gubernurnya tetap apa ganti? Ganti (sorak warga). Yakin? Kok kurang keras. Ganti apa tetap? Mau ganti nomor berapa? Tiga (sorak warga). Tangannya naik dong. Tiga! Yakin ya, tiga ya (sambil mengacungkan jari tiga). Bener? Kenapa nomor tiga, Bu, e... we... jangan ganteng dong. Pinter, **dekat sama Allah, seiman**, iya, Bu? Dekat dengan keluarga. Apalagi? Iya, sembako murah” (Dialog pada video pertama siaran langsung kampanye Anies-Sandi di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, 2 Februari 2017 pukul 11.43 WIB)

“(Pembukaan) ... Ibu, Bapak, kita berkumpul di sini, di Penjaringan. Bulan depan, eh minggu depan akan pemilihan gubernur, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak mau gubernurnya ganti apa tetap? Ganti (sorak warga). Yakin? Benar mau ganti? *Kenapa* mau ganti? Gusur-gusur ya? Iya, di depan sini, Bu, ya? Sampai habis di situ. Mau ganti nomor berapa, Bu? Nomor tiga (sorak warga). Nomor berapa? Tangannya naik dong? (sambil mengacungkan jari tiga). Tiga ya. Kenapa nomor tiga? Santun (sorak warga), o... santun. Apalagi? Ganteng bu, apalagi? Maju kotanya, bahagia warganya. Apalagi? **Islami** (dengan nada tegas). Apalagi? Apanya *gak* bayar? O... rusun. Apalagi yang *gak* bayar?” (Dialog pada video kedua siaran langsung kampanye Anies-Sandi di Penjaringan, Jakarta Utara, 6 Februari 2017 pukul 13.39 WIB)

“Jakarta kota keren yang kita cintai. Misi kami untuk bergerak bersama membangun Jakarta yang damai bagi semua. Semua bersatu dalam perbedaan dan kami **berpeci**” (Dialog dalam video ketiga kampanye yang diunggah

pada akun *Instagram* @aniesbaswedan, 10 Februari 2017)

“Bang Sandiaga Uno akan mengakomodasi perbankan syariah dan permodalan **syariah**. Menurutny, saat ini banyak UKM yang memerlukan permodalan yang tidak mencekik, yang sebetulnya bisa dicapai melalui perbankan syariah dan permodalan syariah, yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman **muslim** di Jakarta.” (Teks dalam video keempat, unggahan status di akun *Facebook* Anies-Sandi, 23 Desember 2016)

Pernyataan Anies Baswedan yang mengandung unsur praktik politik identitas ditunjukkan melalui penyebutan identitas keagamaan, seperti “dekat dengan Allah”, “seiman”, “Islami”, dan “berpeci”. Menurut Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu (2017), politik identitas mengacu pada politisasi isu SARA. Bahasa-bahasa politik yang disampaikan oleh Anies dalam video kampanyenya tersebut memuat frasa-frasa yang menunjukkan atribut-atribut agama yang dianutnya.

Di samping itu, ucapan-ucapan yang mengandung identitas agama tersebut dipertegas dengan kalimat seru yang disampaikan Anies dalam kampanyenya di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah Anies menyampaikan frasa “dekat dengan Allah” dan “seiman”, Anies mempertegasnya dengan kalimat seru, “Iya, Bu!”. Peneliti memahaminya sebagai kalimat seru karena tidak ada kata tanya dalam ucapan Anies Baswedan tersebut. Kata tanya yang dimaksud peneliti misalnya mengapa, apakah, kapan, dan bagaimana. Hal ini menunjukkan bahwa Anies ingin mempertegas ucapannya atau menyatakan kesungguhannya melalui klarifikasi kepada khalayak yang hadir (Pusat Bahasa, 2000, h. 60).

Pada dialog di video kedua, Anies menyebut dirinya “Islami”. Kata “Islami” menunjukkan terminologi identitas keislaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Islami” berarti keislaman (KBBI, n.d.). Sementara itu, berbeda dengan video sebelumnya, video ketiga merupakan video kreatif “Men in Black Berpeci” yang dibuat oleh pasangan Anies-Sandi untuk mendulang suara kalangan muda. Video berdurasi 1 menit 27 detik tersebut cukup mendengungkan identitas keislaman Anies-Sandi. Ini ditunjukkan melalui lirik lagu dalam video tersebut yang sering kali menyebut kata “kami berpeci”. Makna Peci telah mengalami pergeseran, dari identitas atau simbol persatuan nasional ke identitas keagamaan tertentu.

Video keempat merupakan teks status yang diunggah di akun *facebook* Anies-Sandi. Dalam teks tersebut, Anies-Sandi menyebut permodalan “syariah” dan perbankan “syariah”, serta teman-teman “muslim”. Sedangkan dalam aktivitas kampanye di lokasi yang berbeda, pasangan Anies-Sandi tidak membuat program yang dikhususkan untuk kalangan non-muslim. Status tersebut baru diunggah pada tanggal 23 Desember 2016 yang berarti status tersebut baru muncul setelah terjadi aksi bela Islam 212.

Isu Penistaan Agama dan Politik Identitas

Bawaslu (2017, h. 1) menyebutkan bahwa ada beberapa bukti yang menunjukkan isu SARA digunakan oleh aktor politik yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pemenangan

calon tertentu pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Bukti tersebut di antaranya adalah kemunculan komentar, foto, dan video di media sosial yang menghina kelompok tertentu; beredarnya spanduk provokatif yang berisikan tentang larangan memilih pemimpin yang berbeda agama; dan larangan menyolatkan jenazah warga yang mendukung pemimpin yang berbeda agama dan lainnya.

Wacana-wacana tersebut muncul setelah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), terjadi. Ahok menyampaikan pidato kontroversial saat sosialisasi di Kepulauan Seribu. Menurut sejumlah pihak, pidato yang disampaikan Ahok dianggap sebagai praktik penistaan terhadap agama Islam (Nurhasim, dkk., 2016, h. 36).

“Jadi, *enggak usah* pikiran, *Ah* nanti kalau *enggak kepilih* pasti Ahok programnya bubar. *Enggak*, saya (jadi gubernur) sampai Oktober 2017. Jadi, jangan percaya sama orang. Kan, bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu *enggak* bisa pilih saya karena dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu lho (peserta pertemuan tertawa). Itu hak Bapak-Ibu, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan *enggak* bisa pilih *nih* saya takut masuk neraka *dibodohin gitu* ya *enggak apa-apa* karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja.” (Kutipan pidato Ahok di Kepulauan Seribu (Nurhasim, dkk., 2016, h. 36)).

Frasa “*dibohongin* pakai surat Al-Maidah 51” membuat Ahok terjerat kasus penistaan agama. Penyebutan kalimat tersebut terkait pula dengan agenda Pilkada DKI Jakarta 2017. Di samping itu, kasus tersebut tidak hanya memasuki proses hukum, tetapi juga berimplikasi pada wilayah politik yang memobilisasi massa

besar-besaran pada 4 November 2016. Demonstrasi ini berlangsung dalam tiga periode dan berakhir pada 2 Desember 2016. Demonstrasi ini dikenal dengan aksi bela Islam 212.

Aksi bela Islam 212 dikoordinasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan didukung oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Front Pembela Islam (FPI). Gerakan ini semakin menguat karena didukung langsung oleh MUI (Sulistyo, Andhiningrat, Adi, & Taufiqurrohman, 2016, h. 19). GNPF-MUI tidak hanya menuntut proses hukum Ahok, tetapi belakangan juga terlibat dalam politik praktis. Mereka secara terang-terangan menyuarakan dukungan terhadap oposisi Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Anies Baswedan. Ini ditunjukkan melalui sikap imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab, yang menyuarakan dukungannya secara terbuka di depan para peserta aksi (Purnamasari, 2017a) dan ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, yang menghadiri kampanye pasangan Anies-Sandi (Iqbal & Audita, 2017).

Seruan menuntut kasus penistaan agama juga secara massal dilakukan di media sosial. Sejumlah ulama seperti, Habib Rizieq, Abdullah Gymnastiar, dan Tengku Zulkarnain terlibat aktif sebagai *opinion maker* di akun media sosialnya (Syahputra, 2017, h. 472). Berkat dukungan sejumlah ulama, peserta aksi dan ormas Islam membuat posisi Anies semakin menguat, bahkan digunakan untuk melancarkan sejumlah praktik politik identitas.

Politik Identitas dan Kehidupan Demokrasi Indonesia

Wacana politik identitas di Indonesia telah muncul saat era Orde Baru. Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru melakukan sejumlah kebijakan yang sarat dengan praktik politik identitas. Menurut Suryani dan Azmy (2016, h. 5), pemerintah mengeluarkan TAP MPRS No. III/MPRS/1966 tentang kewajiban warga Tionghoa untuk mengindonesiakan nama asli mereka. Ini menunjukkan bahwa secara administratif, nuansa praktik politik identitas telah terjadi saat era Orde Baru, terutama terhadap etnis Tionghoa.

Pada era Reformasi, eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur mengganti Inpres No. 14 tahun 1967 dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 tahun 2000 (Mahfud, 2013, h. 209-210). Namun, dalam dekade terakhir, etnis Tionghoa di Indonesia kembali menjadi korban praktik politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Identitas Ahok sebagai warga Tionghoa dan beragama Non-Islam dimanfaatkan kelompok oposisinya untuk melancarkan praktik politik identitas. Di samping itu, ada konflik laten terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kasus penistaan agama yang menimpa Ahok tidak semata-mata karena persoalan agama, tetapi juga diperkuat oleh peran sejumlah keluarga Soeharto dalam aksi bela Islam 212 (Okezone, 2016; Iqbal & Audita, 2017).

Wacana politik identitas masih berpeluang besar terjadi dalam kontestasi Pemilu 2019. Namun, isu identitas tampaknya akan mengalami pergeseran dari isu etnis Tionghoa menjadi isu Arab. Jika pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 etnis Tionghoa menjadi korban politik identitas, maka pada pemilihan umum mendatang, seperti pemilihan presiden pada tahun 2019, isu etnis Arab atau narasi keislaman bisa menjadi perbincangan politik identitas oleh pihak oposisi. Salah satunya karena citra Habib Rizieq dengan identitas ke *Arab-arabannya* telah diberitakan buruk terkait isu mesum yang menjerat dirinya, sehingga masyarakat akan menilai etnis Arab dengan berkaca kepada perbuatan buruk Habib Rizieq. Itulah sebabnya Anies memiliki kemungkinan kecil mengikuti pemilihan presiden 2019 (Burhani, 2017, h. 6). Politik identitas telah menggerus keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya.

Praktik politik identitas pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 berpotensi memiliki pengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengancam sistem demokrasi bangsa Indonesia di mendatang. Hal ini disebabkan oleh kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan politik identitas berbasis agama. Beberapa gerakan Islam konservatif turut mendukung aksi tersebut. Mereka tidak hanya menyuarakan kewajiban memilih pemimpin Islam, tetapi juga menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah. Mereka menolak demokrasi

dan menentang nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, mereka mengilhami semangat gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang ingin mengubah sistem pemerintahan menjadi berbasis khilafah (Nasution, 2017, h. 67–75; Rosyad, 2006, h. 18–21).

Di Indonesia, semangat gerakan Ikhwanul Muslimin telah terlebih dahulu diadopsi oleh kelompok HTI. Mereka secara massal melakukan perlawanan terhadap ideologi Pancasila, mendengungkan tujuan negara Islam, memobilisasi dukungan, dan memperjuangkan cita-cita demokrasi berbasis Islam di kampus-kampus dan masjid-masjid umum (Ricklefs dalam Fealy & White, 2008, h. 131). Namun, belakangan HTI dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 (Movanita, 2017). Kemunculan praktik politik identitas berbasis agama di ruang publik dan kehadiran simbol-simbol agama yang semakin mencolok di arena politik dan disertai dengan dukungan gerakan-gerakan Islam konservatif ini secara perlahan akan melemahkan demokrasi di Indonesia. Bahkan, di masa mendatang, situasi ini berpeluang mengalami ekspansi gerakan keagamaan besar-besaran seperti yang terjadi di Iran tahun 1979 (Jones, 1980; Naipaul, 1981, h. 311–323).

PEMBAHASAN

Setelah Orde Baru, praktik politik identitas mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tampak dari munculnya organisasi-organisasi sosial yang membawa label etnisitas, agama, golongan, dan kepentingan-kepentingan lokal, seperti

Darul Islam (DI), Gerakan Papua Merdeka (GPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan-gerakan ini menunjukkan sikap anti-demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme, terutama gerakan sosial keagamaan yang menonjolkan simbol-simbol agama untuk menunjukkan identitas agama masing-masing kelompok (Harahap, 2014, h. 802-803).

Di Indonesia, agama memang menjadi sasaran empuk bagi praktik politik identitas. Agama cenderung dijadikan alat untuk menekan kelompok agama lainnya (Ibrahim, 2013, h. 39–40). Salah satu praktik politik identitas berbasis agama yang belakangan terjadi di Indonesia terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Bawaslu, 2017, h. 1). Hasil survei putaran kedua Pilgub DKI 2017 yang dilakukan oleh Lembaga Media Survei Nasional (2017) menunjukkan bahwa sekitar 27,1% publik cenderung memilih pasangan Anies-Sandi karena dilatarbelakangi oleh faktor agama. Sedangkan para pemilih yang memilih Agus-Sylvi (pasangan calon nomor urut 1) pada putaran pertama, sekitar 35%-nya memilih pasangan Anies-Sandi (pasangan calon nomor urut 3) pada putaran kedua Pilkada DKI 2017. Selebihnya, sekitar 10% pemilih Agus-Silvy memilih pasangan Ahok-Djarot (pasangan calon nomor urut 2) pada putaran kedua Pilkada DKI dan 55% pemilih Agus Sylvi belum menunjukkan pilihannya pada putaran kedua Pilkada DKI.

Data tersebut menunjukkan bahwa agama menjadi elemen terpenting dalam kontestasi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Tingginya pengaruh agama terhadap pilihan publik mengindikasikan adanya praktik politik identitas berbasis

agama dalam kontestasi Pilkada DKI, yakni pada kubu pasangan Anies-Sandi. Hal ini ditunjukkan melalui unggahan di media sosial Anies-Sandi yang teridentifikasi sebagai bentuk praktik politik identitas berbasis agama.

Pada konteks *language practice* (bahasa), pernyataan Anies tentang “dekat dengan Allah”, “seiman”, “Islami”, dan “kami berpeci” di akun media sosialnya menunjukkan politik identitas berbasis agama. Castells (2010, h. 7) menyebut politik identitas erat dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh individu tertentu untuk menginternalisasi orang lain terhadap mayoritas identitas yang dimilikinya. Pada konteks *social practice*, hal ini menunjukkan bahwa kata-kata yang bernuansa politik identitas Islam tersebut dimanfaatkan Anies untuk mendulang suara masyarakat muslim Indonesia. Frasa “dekat dengan Allah” menunjukkan bahwa Anies adalah seorang muslim yang taat dalam beragama.

Anies menggunakan kata “Allah” yang identik dengan agama Islam (lihat QS. Toha: 14). Dalam agama lain, “Allah” disebut dengan bahasa yang berbeda. Dalam agama Kristen, Allah disebut dengan istilah Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, dan lainnya (lihat Yohanes, 20: 17; Korintus, 8: 6; Chavan, 1965, h. 14). Kemudian frasa “dekat dengan Allah” dipertegas dengan ucapan “seiman” yang menunjukkan bahwa Anies membawa identitas agamanya karena kata “seiman” berarti menganut paham keagamaan atau agama yang sama (Setiawan & Soetapa, 2010, h. 43).

Selanjutnya, kata “seiman” juga menunjukkan adanya kesamaan sistem keyakinan keagamaan antara khalayak yang hadir dengan Anies. Menurut Setiawan dan Soetapa (2010, h. 43), “seiman” berarti menganut paham keagamaan atau agama yang sama. Sedangkan penggunaan kata “Islami” menunjukkan bahwa Anies adalah seorang muslim yang selalu menghadirkan semangat keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Frasa “kami berpeci” mencerminkan penegasan terhadap kalimat-kalimat sebelumnya. Peci adalah cara khas berpakaian muslim di Indonesia. Sebagai penutup kepala, peci adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga jika seseorang memakai peci, maka hal tersebut menunjukkan sang pemakai adalah seorang muslim yang saleh. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang tidak menutup kepala (berpeci) adalah orang-orang di luar agama Islam. Argumen ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, “Amr bin Huroits radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah sedang beliau memakai surban hitam” (HR Muslim dan Abu Dawud) (Kertamukti, 2013, h. 53).

Dalam konteks sosial yang lebih luas, kalimat-kalimat bernuansa politik identitas diciptakan dan dikonsumsi oleh publik (*discourse practice*). Penyebutan frasa “dekat dengan Allah”, “seiman”, “Islami”, dan “kami berpeci” oleh Anies dalam akun media sosialnya menunjukkan beberapa hal. Pertama, kalimat “dekat dengan Allah” dalam agama Islam bermakna muslim yang

takwa, yaitu menjalankan segala perintah agama dan meninggalkan segala larangan agama (lihat Surah Al-Imron: 102). Salah satu cerminan pribadi muslim yang takwa adalah berkata dengan bahasa yang santun, tidak saling mencela, tidak menistakan keyakinan orang lain, dan lainnya (lihat Surah Al-Hujurat: 11). Kalimat tersebut muncul setelah terjadinya isu penistaan agama yang menjerat lawan politiknya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok yang melakukan penistaan terhadap surat Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu telah mengakibatkan kemarahan umat Islam di Indonesia. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran di Monumen Nasional (Monas) yang dikenal dengan aksi bela Islam 212. Karakter Ahok yang kasar, keras, dan tegas menjadi sisi lain yang dimanfaatkan lawan politiknya untuk melakukan praktik politik identitas. Program kerja Ahok untuk melakukan pergusuran kawasan kumuh di Jakarta dinilai sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Massalnya produksi isu tersebut membuat Anies mengeluarkan kalimat bernuansa politik identitas untuk mencari dukungan masyarakat, sehingga publik dihadapkan pada dua wacana besar, yaitu memilih pemimpin yang berwatak kasar, keras, dan tegas atau sosok pemimpin baru yang “dekat dengan Allah”.

Kedua, kata “Seiman”. Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Agus-Sylvi yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat mendapatkan suara terendah. Hal ini membuat mereka tersingkir dari kontestasi Pilkada DKI. Meskipun demikian, kontestasi Pilkada

DKI Jakarta 2017 tidak berhenti pada putaran pertama saja. Ahok yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak lantas didaulat sebagai pemenang Pilkada DKI 2017. Ini disebabkan suara pemilih Ahok tidak mencapai 50%, sehingga membuat kontestasi Pilkada DKI 2017 harus berlanjut pada putaran kedua (Purnamasari, 2017b).

Pada putaran kedua Pilkada DKI 2017, warga Jakarta dihadapkan pada dua pasang calon yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan etnis. Ahok mencerminkan etnis Tionghoa dan beragama Kristen, sedangkan Anies mencerminkan warga pribumi bersuku Jawa dan mewakili kalangan muslim Indonesia. Populasi penduduk DKI Jakarta berdasarkan agama pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 83,4 persen atau 8,6 juta penduduk DKI Jakarta beragama Islam, 888,8 Ribu beragama Kristen, 411,7 Ribu beragama Khatolik, 385,9 Ribu menganut agama Buddha, 19,4 Ribu beragama Hindhu, 1,2 Ribu beragama Khonghuchu, dan sekitar 226 jiwa memeluk aliran kepercayaan lain (Beritagar, 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa Anies berpeluang besar untuk memperoleh dukungan muslim di Jakarta. Konteks statistik kependudukan inilah yang dimanfaatkan Anies untuk mendapatkan suara muslim di Jakarta melalui praktik politik identitas dengan menyebutkan identitas keislaman seperti frasa “seiman” tersebut.

Di samping itu, praktik politik identitas ini semakin menguat berkat isu penistaan terhadap Surah Al-Maidah 51 yang

dilakukan oleh Ahok. Surah Al-Maidah adalah bagian surah di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang anjuran memilih pemimpin muslim. Kata "seiman" yang disampaikan oleh Anies dalam kampanyenya di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada 2 Februari 2017 digunakan untuk menguatkan pengertian dan penafsiran terhadap Surah Al-Maidah 51.

Wacana yang berkembang pascatragedi Surah Al-Maidah 51 adalah sikap anti terhadap Cina dan Kristen. Wacana anti-Cina ini secara terang-terangan didukung oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Jenderal Gatot Nurmantyo secara terbuka mengatakan bahwa Cina sebagai musuh yang akan melemahkan kekuatan Indonesia dan merusak perekonomian di Indonesia. Selain Gatot Nurmantyo, mantan ketua Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, juga secara terbuka menyebarkan kebencian terhadap Ahok, bahkan menyebutnya dengan istilah Gubernur Kafir Cina (Si Cina Kafir). Ujaran kebencian ini secara massal dilakukan melalui berbagai situs web dan kelompok-kelompok obrolan (Fealy, 2016).

Ketiga, kata "Islami". Konteks kemunculan kata "Islami" dalam kampanye yang dilakukan oleh Anies di Penjaringan, Jakarta Utara, tidak bisa dilepaskan dari fenomena aksi bela Islam 212. Beberapa sarjana telah menjelaskan bahwa aksi bela Islam 212 adalah perwujudan dari munculnya gerakan radikal, konservatif, dan Islamisme di Indonesia (Fealy, 2016; Lindsey, 2017). Jika dihubungkan dengan misi Islamisasi di Indonesia, maka

komponen terpenting adalah memilih pemimpin yang Islami dan mewujudkan kota Islami (USCIRF, 2017, h. 7).

Keempat, frasa "kami berpeci". Menurut Kertamukti (2013, h. 54), peci adalah simbol komunikasi yang digagas oleh Soekarno. Peci menyiratkan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, kesederhanaan, dan kesetaraan. Pada tahun 1921, Soekarno menemukan peci sebagai lambang pergerakan dan identitas bangsa Indonesia. Pada konteks itu, peci dijadikan pembeda antara Eropa dan Indonesia, tetapi belakangan peci menjadi budaya yang kental terkait peribadatan umat Islam (Kertamukti, 2013, h. 56). Frasa "kami berpeci" menyimbolkan bahwa Anies-Sandi adalah satu-satunya pasangan calon Gubernur DKI Jakarta 2017 yang berasal dari kalangan Islam Indonesia.

Selanjutnya, gagasan Sandiaga Uno untuk menghidupkan perbankan syariah dan permodalan syariah menunjukkan praktik politik identitas yang signifikan. Pasalnya, Sandiaga tidak mempunyai program yang sama untuk kalangan non-muslim di Jakarta. Ini menunjukkan praktik subordinasi terhadap kaum non-muslim di Jakarta. Gagasan ini tampaknya bertolak belakang dengan visi Anies-Sandi: "Jakarta Kota Maju dan Beradab dengan Seluruh Warga Merasakan Keadilan dan Kesejahteraan" (Tim Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017, h. 2). Dalam visinya, Anies menyebut frasa "seluruh warga merasakan keadilan", tetapi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, program-program Anies-Sandi terkait Usaha Kecil Menengah (UKM) memihak pada

satu golongan saja, yaitu muslim Jakarta. Sebaliknya, tidak ditemukan program yang sama terkait UKM yang dikhususkan untuk kalangan non-muslim Jakarta.

Praktik politik identitas ini secara massal berlangsung di media sosial. Bahkan isu penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok bergulir liar di ruang virtual yang digerakkan oleh aktor-aktor politik masing-masing calon. Mereka saling perang wacana di media sosial untuk mendapatkan dukungan publik. Menurut Syahputra (2017, h. 467-472), perang siber terjadi dalam bentuk saling memengaruhi melalui wacana, opini, dan isu yang akhirnya menimbulkan gerakan yang dikenal dengan aksi bela Islam. Keberpihakan media pada partai politik tertentu mengakibatkan paralelisme media yang cenderung memberitakan isu penistaan agama menjadi isu kontroversial. Menurut Simarmata (2017, h. 150), paralelisme politik akan membuat media terfokus pada struktur politik, sehingga hal tersebut akan menghilangkan independensi media dalam pemberitaannya.

Sejumlah peneliti (Fealy, 2016; Hadiz, 2017, h. 261-278; Lim, 2017, h. 1-17) telah menyebutkan bahwa kekalahan Ahok pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mencerminkan tumbuhnya gerakan-gerakan Islam radikal, konservatif, dan Islamisme di Indonesia. Kesuksesan gerakan aksi bela Islam 212 yang menuntut agar Ahok dipenjara tidak terlepas dari wacana muslim kelas menengah ke atas di Indonesia. Kemunculan muslim kelas menengah di Indonesia selalu identik

dengan pola konsumsi dan gaya hidupnya sehari-hari (Bourdieu, 1984, h. 169-174). Pola konsumsi kelompok muslim kelas menengah ke atas digambarkan melalui cara muslim mentransformasi identitas mereka melalui perilaku konsumsi terhadap barang-barang Islami dan terlibat dalam dukungan politik Islam (Dick, 1985, h. 91-92; 1990, h. 63-70).

Setidaknya, kemunculan kelompok muslim kelas menengah ke atas di Indonesia dilatarbelakangi oleh empat aspek penting. Pertama, meneruskan perjuangan politik Islam untuk mewujudkan demokrasi yang Islami (Hefner, 2000, h. 3-10). Kedua, kemunculan muslim kelas menengah ke atas menunjukkan lahirnya budaya kosmopolitan dan konservatif. Ketiga, pemahaman tentang isu anti-Barat. Keempat, kemunculan muslim kelas menengah ke atas mengilhami ideologi Islam eksplisit, terutama Salafi.

Muslim kelas menengah ke atas di Indonesia secara aktif terlibat dalam gerakan aksi bela Islam di Monas. Mereka tidak hanya mengonsumsi barang-barang Islami dalam konteks sehari-hari, tetapi juga menampilkan keislaman mereka di ruang publik. Simbol-simbol Islam seperti teriakan "Allahu Akbar", pakaian koko putih, bendera tauhid, dan sorban mereka tampilkan di medan aksi. Mereka tidak peduli pihak yang menggerakkan dan mengorganisasikan gerakan tersebut, tetapi kehadiran mereka adalah panggilan hati untuk membela Islam dan kitab suci mereka, serta menampilkan kesalahan mereka di ruang publik (Fealy, 2016).

Keterlibatan sebagian dari kelompok muslim kelas menengah ke atas yang ikut aksi bela Islam tidak berdasarkan aspek agama saja, tetapi ada konflik laten, terutama terkait persaingan ekonomi. Sejak zaman kolonial, etnis Tionghoa di Indonesia telah mendapatkan tempat yang strategis dalam memperoleh perekonomian (Hadiz, 2017, h. 265). Pasar ekonomi di Indonesia berada dalam dominasi pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa, sehingga pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia merasa tidak mampu untuk menembus dominasi itu.

Kemunculan isu penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi kesempatan bagi muslim kelas menengah ke atas di Indonesia untuk menebar sentimen dan retorika anti-Tionghoa di ruang publik. Weng (2016) melihat retorika anti-Tionghoa ini sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas politik di Indonesia. Menurut Weng (2016), sentimen anti-Tionghoa setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu persaingan politik, disparitas ekonomi, dan perbedaan agama. Bagi muslim kelas menengah ke atas, aksi bela Islam tidak hanya dipakai sebagai kesempatan untuk meluapkan kecemasan mereka, tetapi sekaligus menegosiasikan posisi mereka di hadapan kelas menengah yang lebih mapan.

Aksi bela Islam 212 semakin menguat akibat peran tokoh agama Islam. Habib Rizieq yang juga sebagai imam besar FPI sangat agresif dalam menyuarakan isu penistaan agama. Habib Rizieq yang acap kali menggunakan identitas ke *Arab-araban* dan terkenal intoleransi mengakibatkan

Ahmad Syafii Maarif, mantan ketua Muhammadiyah, menyebutnya sebagai “preman berjubah” (Burhani, 2017, h. 4). Isu keturunan etnis Arab yang dimiliki oleh Anies Baswedan juga menjadi nilai tambah baginya untuk mendapatkan antusiasme masyarakat dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan wacana anti-non-muslim. Di samping itu, peran kakek Anies (Abdurrahman Baswedan) yang dipuji rakyat Indonesia karena telah mampu mengintegrasikan orang Indonesia dan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi penguat (Burhani, 2017, h. 5). Arab mendapatkan citra yang baik di mata Indonesia, meskipun merupakan kebudayaan asing. Hal ini berbeda dengan etnis Tionghoa yang cenderung dimaknai sebagai penjajah dan penindas.

Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak oposisi juga melakukan perlawanan untuk melemahkan isu anti-Tionghoa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyambutan kunjungan kerja Raja Arab Saudi ke Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Ahok. Sejumlah tokoh PDIP, seperti Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ahok, turut menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Soekarno Hatta. Penyambutan dan penjamuan Raja Salman digunakan untuk menunjukkan bahwa orang Arab asli sangat berbeda dengan orang Arab Indonesia (dalam hal ini direpresentasikan oleh Habib Rizieq). Hal ini dimaksudkan untuk memengaruhi masyarakat bahwa Islam itu toleran dan berbeda dengan ajaran Habib Rizieq (Burhani, 2017, h. 5).

Di samping itu, ada pergeseran aktivitas politik yang terjadi setelah munculnya isu penistaan agama yang salah satunya ditandai dengan pergeseran dominasi politik identitas. Organisasi keagamaan, seperti FPI dan GNPF-MUI, lebih mendominasi aktivitas politik identitas untuk melanggengkan pasangan Anies-Sandi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Pasangan Anies-Sandi cenderung menjadi *silent reader* yang seolah-olah tidak ikut dalam politik identitas dan fokus dengan program kerja ke depan jika memimpin DKI. Pergeseran dominasi politik identitas ini yang mengaburkan politik identitas Anies-Sandi pada kampanye sebelumnya. Politik identitas ini cenderung menjadi politik identitas perspektif instrumentalis. Menurut Hall, Held, dan McGrew (1992, h. 275), perspektif instrumentalis melihat bahwa identitas adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang dibangun dengan proses manipulasi dan mobilisasi dengan memanfaatkan atribut-atribut identitas yang sudah tersusun sejak awal.

Di samping itu, upaya memobilisasi massa juga secara aktif berlangsung di media sosial. Lim (2017, h. 1) menjelaskan bahwa dampak media sosial dan polarisasi politik identitas yang menguat, khususnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui mobilisasi aksi bela Islam, telah memunculkan suatu potensi ancaman bagi tradisi demokrasi di Indonesia. Di media sosial, perang siber yang berlangsung membawa pesan-pesan politik identitas. Setiap orang memungkinkan untuk melakukan politik identitas melalui

unggahan, *tweet*, dan *caption* sesuai dengan kecenderungan dukungannya. Menurut Syahputra (2017, h. 459), tradisi media baru memungkinkan siapa saja secara anonim menjadi *opinion leader*.

Belakangan, politik identitas cenderung dilakukan oleh organisasi-organisasi berlabelkan “Islam”, seperti MMI, FPI, HTI, dan PKS, walaupun kemudian PKS menjadi partai politik Islam yang menerima demokrasi dan pluralisme. MMI, FPI, dan HTI merupakan gerakan yang cenderung membawa misi politik identitas agama dan bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, misi kekhilafahan menjadi fokus perjuangan organisasi radikal tersebut. Maarif (2012, h. 24-25) menyayangkan misi semacam itu karena pada dasarnya organisasi radikal tersebut tidak mengungkapkan kejujuran perihal sistem khilafah yang selama berabad-abad telah membunuh egalitarianisme yang diakui dalam demokrasi dan begitu tegas dinyatakan dalam Alquran. Namun, pada akhirnya, tanggal 19 Juli 2017 HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan Pancasila dan mengancam ketertiban dan keamanan NKRI (Movanita, 2017).

Perbedaan politik identitas di masa Orde Baru dan sekarang terlihat dari politik identitas yang awalnya dilakukan melalui kekuasaan pemimpin negara (Soeharto) berubah menjadi kebijakan organisasi masyarakat (FPI dan GNPF-MUI) dan aktor politik. Politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Pada abad ke-

19, kaum perempuan Barat telah menjadi korban politik identitas, sehingga pada abad ke-20 muncullah gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan atas kaum laki-laki (Smith & Rapper, 2004, h. 228). Di Barat, politik identitas dilakukan untuk mencari keadilan, namun di Indonesia politik identitas justru cenderung digerakkan oleh kelompok arus utama, salah satunya kelompok agama mayoritas yang berusaha menyingkirkan dan menindas kaum minoritas. Hal ini terbukti pada masa Orde Baru sebanyak 456 rumah ibadah (gereja) dirusak, ditutup, maupun diresolusi (Santoso dalam Maarif, 2012, h. 47).

Politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 telah mencederai kedewasaan demokrasi di Indonesia. Bahkan menurut Burhani (2017, h. 6), dalam pemilihan umum mendatang, potensi terjadinya praktik politik identitas masih relatif tinggi. Belakangan muncul berbagai peristiwa intoleransi dan sentimen keagamaan yang merusak tatanan pluralisme di Indonesia, seperti serangan di Gereja Katolik Santa Lidwina di Yogyakarta oleh sekelompok orang bersenjata tajam; penganiayaan ulama muslim di Bandung oleh kelompok sekte Islam yang berbeda; dan pengusiran biksu Buddha di Banten oleh tetangganya yang beragama Islam (Nathalia, 2018).

Direktur eksekutif Institut Perdamaian Internasional, Taufik Andrie, mengatakan bahwa menjelang Pemilu tahun 2018 dan 2019 banyak aktor politik memanfaatkan kekuatan kelompok radikal untuk menyebarkan isu

sektarian, etnis, agama, dan antargolongan (Nathalia, 2018). Politik identitas ini dilakukan untuk mendapatkan kepentingan politik pasangan calon Pemilu. Oleh karena itu, peran tokoh agama dan pemerintah teramat penting untuk membasmi kelompok-kelompok radikal yang dapat melemahkan nilai-nilai kebhinekaan, nasionalisme, dan pluralisme di Indonesia.

Semangat nasionalisme dan penghargaan terhadap pluralisme akan menjadi kekuatan bagi Indonesia yang sedang belajar berdemokrasi. Mulia (dalam Maarif, 2012, h. 50) mengatakan bahwa pluralisme tidak berarti seseorang harus menanggalkan identitas keagamaan dan komitmennya terhadap agama tertentu. Inti pluralisme adalah perjumpaan komitmen untuk membangun hubungan sinergis satu dengan yang lain. Fakta pluralisme tersebut baru dianggap berguna jika kelompok berbeda dalam hal etnis, agama, kepentingan politik, dan seterusnya sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk berdialog dan bersinergi secara kuat guna membangun solidaritas dan kemanusiaan. Dengan demikian, pluralisme tidak bermaksud melebur berbagai identitas yang ada, tetapi merangkai berbagai identitas itu demi tujuan kemanusiaan yang hakiki.

SIMPULAN

Praktik politik identitas yang dilakukan oleh Anies-Sandi di akun media sosialnya mencerminkan konsep baru dalam praktik politik identitas. Praktik politik identitas tidak hanya berlangsung dalam ruang *offline*, tetapi juga berlangsung dalam

konteks *online*. Praktik politik identitas Anies-Sandi semakin menguat karena didukung oleh sejumlah tokoh agama dan organisasi keagamaan.

Selain itu, isu penistaan terhadap surah Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok semakin membuka peluang bagi Anies-Sandi untuk mewacanakan praktik politik identitas. Kemunculan dan keberhasilan politik identitas pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan semakin menguatnya gerakan Islam konservatif, radikal, dan Islamisme di Indonesia. Gerakan ini diinisiasi oleh kalangan muslim kelas menengah ke atas di Indonesia yang mulai menampilkan simbol-simbol Islam ke ruang publik. Di samping itu, faktor persaingan ekonomi di kalangan muslim kelas menengah ke atas dan etnis Tionghoa menjadi pemicu massalnya gerakan-gerakan tersebut.

Menguatnya gerakan Islam radikal dan konservatif akan berimplikasi pada melemahnya demokrasi Pancasila di Indonesia. Di samping itu, khazanah politik di Indonesia akan berubah menjadi politik sektarian, sentimen etnisitas, agama, suku, dan golongan. Kalangan minoritas pun akan tersubordinasikan dari dominasi mayoritas. Selanjutnya, secara bertahap Pancasila akan dilemahkan dengan ideologi negara Islam (Khilafah Islamiyah) yang dibawa oleh gerakan-gerakan Islam radikal dan konservatif tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Alejandro, J. (2010). *Journalism in the age of social media*. <<https://www.mediaforum.md/upload/theme-files/journalism-in-the-age-of-social-mediapdf-554fbf10114c6.pdf>>

Anies Baswedan (2017, Februari 10). *Men in black peci parody* (Video file). Diambil dari <https://www.instagram.com/p/BQUw9cbj0Uj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ecxgo7gfzy3b>

Anies-Sandi. (2016, Desember 22). Bang Sandiaga Uno akan mengakomodasi perbankan syariah dan permodalan syariah. Diambil dari <**Error! Hyperlink reference not valid.**>

Anies-Sandi. (2017, Februari 1). *Sosialisasi mas Anies Baswedan di Kembangan Jakarta Barat* (Video file). Diambil dari <https://www.facebook.com/jakarta_majubersama/videos/403591906651782/>

Anies-Sandi. (2017, Februari 5). *Mas Anies Baswedan Sosialisasi di Penjaringan, Jakarta Utara*. (Video file). Diambil dari <<https://www.facebook.com/jakartamajubersama/videos/406081053069534/>>

Atriana, R. (2016, September 24). Begini profil dan perjalanan anies baswedan jadi cagub DKI. *Detik.com*. <<https://news.detik.com/berita/d-3305643/begini-profil-dan-perjalanan-anies-baswedan-jadi-cagub-dki>>

Banducci, S. A., Donovan, T., & Karp, J. A. (2004). Minority representation, empowerment, and participation. *Journal of Politics*, 66(22), 534–556.

Bawaslu. (2017). *Potensi penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018*. <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout_Politik%20Identitas.pdf>

Beritagar. (2016). Populasi penduduk DKI Jakarta berdasarkan agama. *Beritagar.id*. <<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/populasi-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-agama-1520252043>>

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. London, United Kingdom: Routledge and Kegan Paul.

Burhani, N. (2017). Ethnic minority politics in Jakarta's gubernatorial election. *Perspektif Iseas Yusof Ishak Institute*, 39, 1-6.

- Burke, P. (2000). *Sejarah sosial media*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Cann, A., Dimitriou, K., & Hooley, T. (2011). *Social media: A guide for researchers*. <<https://derby.openrepository.com/handle/10545/196715>>
- Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *International Journal of Communication*, 1, 238-266.
- Castells, M. (2010). *The power of identity (2nd ed)*. West Sussex, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Chavan, R. (1965). *Mengenal agama Kristen*. Bandung, Indonesia: Yayasan Kalam Hidup.
- Dick, H. (1985). The rise of a middle class and the changing concept of equity in Indonesia: An interpretation. *Indonesia*, 39, 91–92.
- Dick, H. (1990). Further reflection on the middle class. Dalam R. Tanter dan K. Young (ed), *The Politics of Middle Class Indonesia* (h. 63-70). Clayton, Australia: Centre for Southeast Asian Studies.
- Fairclough, N. (1992). *Language and power*. London, United Kingdom: Longman.
- Fealy, G. (2016, Desember 7). Bigger than Ahok: Explaining the 2 december mass rally. *Indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au*. <<http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>>
- Fealy, G., & White, S. (Ed.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278.
- Hai, L. (2002). Electoral politics in Malaysia: “Managing” elections in a plural society. dalam A. Croissant, G. Bruns, & M. John (ed.), *Electoral politics in Southeast and East Asia: A comparative perspective*. Singapore: Friedrich Ebert Stiftung.
- Hall, S., Held, D., & McGrew, T. (1992). *Modernity and its future*. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice* (3rd ed). London, United Kingdom: Routledge.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An introduction to qualitative research*. Yorkshire, United Kingdom: The National Institute Health Research for Yorkshire and the Humber.
- Harahap, F. R. (2014, Mei). *Politik identitas berbasis agama*. Dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sosiologi III, Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan yang Bermakna. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil islam, muslim and democratization in Indonesia*. New York, NY: Princeton University Press.
- Howard, P. N., & Parks, M. R. (2012). Social media and political change: Capacity, constraint, and consequence. *Journal of Communication*, 62(2), 359–362.
- Ibrahim. (2013). *Dari politik identitas ke politik kewarganegaraan*. Yogyakarta, Indonesia: Danadyaksa.
- Indonesiaindicator. (2016, Desember 30). *Melihat hasil survei pilkada DKI 2017 dari tiga lembaga*. <<http://indonesiaindicator.com/112-infographic/267-melihat-hasil-survei-pilkada-dki-2017-dari-tiga-lembaga.html>>
- Iqbal, M., & Audita, M. (2017, April 9). Bachtiar Nasir hadir kampanye Anies di setiabudi. *Kumparan.com*. <<https://kumparan.com/@kumparannews/bachtiar-nasir-hadiri-kampanye-anies-di-setiabudi>>
- Jones, S. R. (1980). “It can’t happen here”: A post-Khomeini look at Indonesia Islam. *Asian Survey*, 20(3), 311–323.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kertamukti, R. (2013). Komunikasi simbol: Peci dan pancasila. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 6(1), 53–66.

- Kozinet, R. V. (2010). *Netnography: Doing ethnographic research online*. Singapore: SAGE Publications.
- Li, C. (2008). Ethnic minority elites in 'party-state leadership: An empirical assessment. *China Leadership Monitor*, 25, 1–13.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Lindsey, T. (2017, April 20). Ahok's defeat bodes ill for the future. *Indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au*. <<http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/ahoks-defeat-bodes-ill-for-the-future/>>
- Maarif, A. S. (2012). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Jakarta, Indonesia: Democracy Project.
- Mahfud, C. (2013). *Manifesto politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent "yes". *Journal of Politics*, 61(3), 628–657.
- McNair, B. (2003). *An introduction to political communication*. London, United Kingdom: Routledge.
- Median. (2017). *Survei pilgub DKI 2017: "Memahami peta kompetisi putaran ke-2 pilgub DKI"*. <<https://www.median.or.id/wp-content/uploads/2017/03/PRESS-RELEASE-PILKADA-DKI-PUTARAN-2.pdf>>
- Movanita, A. N. K. (2017, Juli 19). HTI resmi dibubarkan pemerintah. *Kompas.com*. <<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>>
- Naipaul, V. (1981). *Among the believers: An Islamic journey*. London, United Kingdom: Andre Deutsch.
- Nasution, H. B. (2017). Ikhwanul muslimin and the future of Islamic movement. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 22(11), 67–75.
- Nathalia, T. (2018, Februari 21). Intolerance, identity politics on the rise ahead of 2018 and 2019 elections in indonesia. *Jakartaglobe.id*. <<http://jakartaglobe.id/news/intolerance-identity-politics-rise-ahead-2018-2019-elections-indonesia/>>
- Noviandari, L. (2015, November 25). *Statistik pengguna internet dan media sosial terbaru di Indonesia*. <<https://id.techinasia.com/talk/statistik-pengguna-internet-dan-media-sosial-terbaru-di-indonesia>>
- Nurhasim, dkk. (2016, November 7-13). "Dari Pulau Seribu." *Majalah Tempo*.
- Okezone. (2016, Desember 2). Foto putri bungsu pak Harto ikut aksi 212 di monas. *News.okezone.com*. <<https://news.okezone.com/read/2016/12/02/337/1557175/foto-putri-bungsu-pak-harto-ikut-aksi-212-di-monas>>
- Phillips, A. (1998). *The politics of presence*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Purnamasari, D. M. (2018, Juli 27). Nama Anies Baswedan masih ada di internal PKS. <<http://www.beritasatu.com/politik/503041-nama-anies-baswedan-masih-ada-di-internal-pks.html>>
- Purnamasari, N. (2017a, Juni 27). Habib Rizieq: Habaib wajib dukung Anies pimpin Jakarta. *Detik.com*. <<https://news.detik.com/berita/d-3542717/habib-rizieq-habaib-wajib-dukung-anies-pimpin-jakarta>>
- Purnamasari, N. (2017b, Februari 15). Begini Mekanisme Jika Pilgub DKI Dua Putaran. *Detik.com*. <<https://news.detik.com/berita/d-3423649/begini-mekanisme-jika-pilgub-dki-dua-putaran>>
- Pusat Bahasa. (2000). *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rosyad, R. (2006). *A quest for true Islam: A study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung, Indonesia*. Canberra, Australia: ANU Press.
- Setiawan, M. N. K., & Soetapa, D. (2010). *Meniti kalam kerukunan: Beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen*. Yogyakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia.

- Simarmata, S. (2017). Paralelisme politik media dalam pemberitaan pemilu 2014 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 149-168.
- Smith, L., & Rapper, W. (2004). *Ide-ide filsafat dan agama dulu dan sekarang* (Terj. Hardono Hadi). Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Sulistiyo, B., Andhiningrat P., H., Adi, P. S., & Taufiqurrohman. (2016, Oktober 31). Elektabilitas Ahok setelah 4 november. *Arsip.gatra.com* <<http://arsip.gatra.com/2016-10-31/majalah/artikel.php?pil=23&id=163168>>
- Suryani, & Azmy, A. S. (2016). *Politik identitas dan nasionalisme kebangsaan: Studi atas penguatan politik identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca orde baru*. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Syarif Hidayatullah.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 379–398.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi virtual dan perang siber di media sosial: Perspektif netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 97–116.
- Tim Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Data dan Infografik Pilkada DKI Jakarta 2017*. Jakarta, Indonesia: KPU Provinsi DKI Jakarta.
- USCIRF. (2017). *Indonesia*. www.uscirf.gov. <<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.Bahasa%20Indonesia.translation.pdf>>
- Weng, H. W. (2016, September 28). A rise in anti chinese rhetoric. *Newmandala.org*. <<https://www.newmandala.org/rise-anti-chinese-politics-malaysia-indonesia/>>
- Yovita. (2017). Selama 2016, 300 akun medsos penyebar hoax diblokir polisi. *Kominfo.go.id*. <https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar%20-hoaxdiblokir-polisi/0/sorotan_media>
- Yulianti, T. (2017, Februari 7). Strategi Anies-Sandi manfaatkan media sosial untuk kampanye. *Tirto.id*. <<https://tirto.id/strategi-anies-sandi-manafaatkan-media-sosial-untuk-kampanye-ciyM>>

